

## ABSTRAK

### PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA PROGRAM KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG PRINGSEWU

Oleh:

**KSATRIA DIRGANTARA**

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunannasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana yang tidak sedikit. Untuk memperoleh dana tersebut, salah satu cara yaitu dengan kegiatan perkreditan perbankan. Dalam praktek perjanjian kredit, bank mensyaratkan adanya jaminan yang berfungsi untuk menjamin hutang jika debitur wanprestasi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pringsewu dan bagaimana pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pringsewu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan tipe penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan yang ditunjang dengan studi lapangan berupa wawancara dengan pihak terkait dan kemudi dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian di lapangan diperoleh hasil bahwa mekanisme pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk nasabah harus memenuhi semua syarat yang telah disediakan oleh bank, karena pihak bank harus mengetahui latar belakang kreditur agar tidak terjadi wanprestasi dikemudian hari. Jika nasabah tidak dapat memenuhi syarat, maka pihak bank akan meminta kembali atau bisa langsung ditolak.

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia dilakukan dengan *parateksekusi*, dengan alasan debitur wanprestasi dapat dilaksanakan melalui Lembaga Lelang Negara (KPKNL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dengan *parate eksekusi* dimaksudkan untuk memperoleh pelunasan piutangnya secara cepat dan efisien.

**Kata Kunci:** Eksekusi, Hak Tanggungan

## ABSTRACT

### **PROVISION OF HOUSE OWNERSHIP CREDIT (KPR) AND IMPLEMENTATION OF RIGHTS EXECUTION IN THE HOME OWNERSHIP CREDIT (KPR) PROGRAM PT. INDONESIAN PEOPLE'S BANK (PERSERO) TBK. PRINGSEWU BRANCH**

By

**KSATRIA DIRGANTARA**

Economic development, as part of national development, is one of the efforts to realize a just and prosperous people's welfare. With the increase in development activities, the need for less funds is also increasing. To obtain these funds, one way is by banking credit activities. In the practice of credit agreements, banks require guarantees that function to guarantee debt if debtor dilatory to pay back.

The formulation of the problem in this study is what is the mechanism of giving home loan on PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch Pringsewu and how to execute mortgage on PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch Pringsewu

The type of research used is an empirical juridical approach that combines legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field with descriptive research types. The data collection method used is library research supported by field studies in the form of interviews with related parties and then analyzed qualitatively.

In the field research, the results of the crediting mechanism were obtained on PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is the creditor's must fulfill all the conditions provided by the bank, because the bank must know the creditor's background so that there is no default in the future. If the customer cannot fulfill the requirements, the bank will ask for it again or it can be immediately rejected.

Execution mortgage on home loan program PT. Bank Rakyat Indonesia performed with parate execution, for reason the default debtor can be carried out through KPKNL. Based on Government Regulation Number 33 of 2006 concerning Procedures for the Elimination of State or Regional Receivables. The execution of mortgages with parate execution to obtain repayment of receivables quickly and efficiently.

**Keywords: Execution, Mortgage**